BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.¹

Salah satu tindak pidana yang sudah menyebar secara luas di Indonesia adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi ini sudah meluas dalam masyarakat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan bahwa: “Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 pasal

¹Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13.

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Perkembangan tindak pidana korupsi juga terus meningkat dari Tahun ke Tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.²

ICW (*Indonesia Corruption Watch*) melakukan pemantauan adanya peningkatan yang sangat signifikan dari Tahun ke Tahun, sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 warga yang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum dan lebih lanjut kasus yang berhasil terpatu, kerugian negara mencapai Rp 28.412.786.978.089, (Rp.28,4 triliun), potensi suap-menyuap dan gratifikasi sebesar Rp 422.276.648.294 (Rp.422 miliar), potensi pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp 10.156.703.000 (Rp 10 miliar), dan potensi aset

²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005, hlm. 67.

yang disamarkan melalui pencucian uang sebesar Rp 256.761.818.137 (Rp256 miliar).³

Korupsi bisa dikatakan atau digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*ekstra ordinary crime*), tidak hanya karena modus dan sistem yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial budaya, dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.⁴ Korupsi terus terjadi sehingga menggerus hak rakyat atas kekayaan negara dan kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu lembaga hukum yang mengatasi kasus korupsi berada di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁵

Tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya terjadi pada pejabat sipil maupun pihak korporasi, tetapi juga sudah melibatkan pejabat militer yang pada prinsipnya terkenal dengan kedisiplinannya, kini justru sudah banyak dari mereka yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi.⁶ Menilik pada sejarah, kasus korupsi yang melibatkan anggota militer atau TNI memang sudah cukup banyak terjadi baik yang dilakukan dalam lingkungan internal maupun bersama-sama dengan kalangan sipil. Namun, satu hal yang selalu muncul dan menjadi permasalahan jika korupsi melibatkan anggota TNI adalah tak lain

³Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2024, hlm. 10.

⁴Mien Rukimini, *Aspek Pidana dan Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 111.

⁵Elwi Danil, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 15.

⁶Ahmad Jamaludin, "Problematika Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota TNI Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN, Vol.8 No.2, Agustus 202, hlm. 370.

berkaitan dengan kewenangan dan kekhususan yang kemudian akan mendorong terjadinya sebuah benturan dan konflik kewenangan.

Hal demikian bisa terjadi karena terkait militer dan tindak pidana korupsi sama-sama mempunyai lembaga penegak hukum dan mekanisme yang khusus. TNI mempunyai mekanisme peradilan militer dan tindak pidana korupsi pula mempunyai mekanisme pengadilan tindak pidana korupsi yang didalam prosesnya juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas sebagai *trigger mechanism* serta *leading sector* dalam masalah memerangi dan menyelesaikan tindak pidana korupsi. Problematika tersebut bukanlah hal baru, namun menjadi ramai kembali dengan hadirnya kasus terbaru terkait korupsi yang melibatkan anggota TNI pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK berkaitan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa periode Tahun 2021-2023 di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS).

KPK menyatakan bahwa Kabasarnas Marsdya Henri Alfian terlibat kasus korupsi pengadaan alat deteksi korban reruntuhan dengan nilai suap sebesar Rp 88,3 miliar dalam kurun waktu 2021-2023. KPK sebelumnya menetapkan total lima tersangka terkait kasus dugaan korupsi suap menyuap pada pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan Tahun Anggaran 2023 di Basarnas RI. Kelima tersangka ini antara lain: Kabasarnas RI periode 2021- 2023 Henri Alfiandi; Anggota TNI AU sekaligus Koordinator Administrasi (Kooramin) Kabasarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto; Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT

Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya; dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil.⁷

Menurut pengakuan KPK, penetapan tersangka ini sudah berkoordinasi dengan Puspom TNI. Selama proses penyidikan, KPK bahkan mengajak ekspose bersama dengan Puspom TNI.⁸ Di lain pihak, Komandan Puspom TNI, Marsekal Muda Agung Handoko mengatakan pihaknya sempat menyampaikan keberatan sebelum KPK mengumumkan dua prajurit TNI aktif sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Basarnas. Agung mengatakan Puspom TNI punya aturan sendiri. TNI menilai memiliki wewenang menetapkan proses hukum kepada prajurit aktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Melihat fakta kronologis yang terungkap dalam prosesnya, sejatinya secara prosedural hukum jelas tidak ada suatu masalah atau kekeliruan karena secara koordinasi maupun syarat bukti telah terpenuhi, namun justru dalam kasus ini KPK sendiri lah yang gagap dan tidak meyakini tindakannya, puncaknya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak meminta maaf kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono karena telah menangkap tangan dan menetapkan tersangka pejabat Basarnas dari lingkup militer. Adapun alasan KPK melakukan permintaan maaf kepada Panglima TNI terkait penanganan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas karena ada

⁷Fauzi Ferdian, "Danpuspom: Penetapan Tersangka Prajurit TNI oleh Salahi Ketentuan", CNN Indonesia, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230728145653-12979088/danpuspom-penetapan-tersangka-prajurit-tni-oleh-kpk-salahi-ketentuan>, tanggal akses 12 Maret 2025.

⁸*Ibid*

kekhilafan dari tim penyelidik ketika melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Selanjutnya, proses hukum 2 (dua) anggota aktif TNI Basarnas ini diserahkan kepada Puspom TNI.⁹

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 11 ditentukan bahwa dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; *dan/atau*
2. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka KPK berhak menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kabasarnas Marsdya Henri Alfian karena Kabasarnas merupakan penyelenggara negara. Perlu diketahui bahwa Basarnas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Oleh karenanya maka Basarnas merupakan lembaga sipil dan bukan lembaga militer walaupun dalam praktiknya banyak dari anggota Basarnas yang merupakan anggota militer. Meskipun saat

⁹Dian Erika Nugraheny dan Nursita Sari, "Ketika KPK Minta Maaf, Mengakui Khilaf Kabasarnas sebagai Tersangka Suap", Kompas.com, 29 Juli 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/29/07251341/ketika-kpk-minta-maaf-mengakukhilaf-karena-tetapkan-kabasarnas-sebagai-tersangka>, tanggal akses 12 Maret 2025.

melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan Kabasarnas sedang menduduki jabatan sipil yakni sebagai kepala Basarnas, namun, perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, prajurit TNI tidak perlu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan saat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi bidang tertentu yang salah satunya adalah *Search And Rescue* (SAR) nasional. Maka, berdasarkan pasal tersebut Marsekal Madya Henri Alfiandi saat menduduki jabatannya dalam Basarnas dirinya tetap dianggap sebagai prajurit aktif, sehingga ketentuan hukum-hukum militer tetap melekat dan berlaku pada dirinya karena dirinya menurut undang-undang tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Contoh kasus di atas merupakan contoh kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI aktif yang sedang menjabat sipil yang diadili pada pengadilan militer, kasus ini diadili sesuai dengan apa yang diamanatkan pada peradilan militer. Namun hal ini tidaklah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada kenyataannya masih terjadi ambigu atau tidak jelas kewenangan dalam hal memeriksa tindak pidana korupsi antara KPK dengan Peradilan Militer, yang mana mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan mengadili antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Pengadilan Militer untuk

memeriksa serta memutus perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di TNI. Saat ini tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh masyarakat sipil diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan anggota TNI diperiksa di Pengadilan Militer. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan amanat yang berada pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum”. Pada Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI ditentukan bahwa “prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan yang serius tentang siapa yang sesungguhnya berwenang memeriksa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI. Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan terjadinya problematika hukum berupa konflik norma. Adanya hal yang bertolak belakang ini mengindikasikan terjadinya konflik norma. Antara norma hukum dengan norma

kebiasaan masyarakat dalam kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Hans Nawiasky menyatakan bahwa: “sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berjenjang-jenjang dan berlapis”.¹⁰

Norma yang di bawah berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, hingga pada norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar. Dalam melakukan identifikasi aturan hukum seringkali ditemui keadaan konflik antar norma hukum atau antinomi hukum (selanjutnya disebut konflik norma), kekosongan norma, dan norma yang kabur.¹¹ Istilah konflik norma dikenal sebagai keadaan adanya suatu peraturan perundangan yang tidak selaras satu sama lain dan tumpang tindih.¹²

Konflik norma dapat berupa konflik norma vertikal maupun horizontal. Konflik norma vertikal merupakan suatu ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan konflik norma horizontal adalah suatu

¹⁰Meta Suriyani, (2016), “Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/113733-ID-pertentangan-asas-perundang-undangan-dal.pdf>, hlm. 69, diakses pada 28 Februari 2025.

¹¹Periksa, Habibul Umam Taquiddin, (2017), “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343> Vol 1, No 2, hlm. 191, diakses pada 28 Februari 2025.

¹²Periksa, Kadek Widya Antari, et al, (2019), “Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Nomen (Konflik Norma), antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar - Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775>, Vol 2, No 2, hlm. 89, diakses pada 28 Februari 2025.

ketidakselarasan antara norma-norma yang memiliki kedudukan atau hierarki yang setara menurut peraturan-perundangan. Konflik norma vertikal sering disebut sebagai disharmoni peraturan perundangan, sedangkan konflik norma horizontal disebut disinkronisasi peraturan perundangan.¹³ Berikut ini merupakan langkah penyelesaian apabila menemukan disharmoni peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
- 2) Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
 - a. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi.
 - b. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.
- 3) Menerapkan asas hukum/doktrin hukum.

Sebagaimana yang telah disebutkan asas hukum dapat digunakan dalam penyelesaian konflik norma. Apabila peneliti menemui konflik norma dapat menggunakan asas preferensi sesuai ketentuan peraturan perundangan. Asas preferensi yang dapat digunakan yaitu:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Menurut Hans Kelsen, peraturan perundang-undangan secara hierarki berada di atas dianggap sebagai yang benar sehingga peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan.

¹³Periksa, Slamet Suhartono, (2019), "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum*, diakses melalui <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2549/pdf>, Vol 15, No 2, hlm. 201-205, tanggal akses 28 Februari 2025.

2. *Lex specialis derogat legi generali*, pertentangan norma hukum dapat terjadi antara peraturan perundangan yang bersifat umum dengan peraturan perundangan yang lebih khusus, sehingga menurut asas ini peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. *Lex posteriori derogat legi priori*, bila terjadi pertentangan norma hukum yang memuat materi yang sama, antara peraturan perundangan yang lebih baru dengan peraturan perundangan yang lama, maka menurut asas ini peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kewenangan ini mencakup semua instansi, termasuk militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK yang menentukan bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan perkara koneksitas yang melibatkan anggota TNI dan masyarakat sipil. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menetapkan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk korupsi, tunduk pada peradilan militer. Pasal 9 Undang-Undang Peradilan Militer menentukan bahwa penyidikan dilakukan oleh Polisi Militer dan Oditur Militer, yang kemudian berkoordinasi dengan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum).

Disinilah terjadi problematika hukum kalau memperhatikan asas hukum *Lex posterior derogat legi priori* (Peraturan yang lebih baru

mengesampingkan peraturan yang sebelumnya). Dalam penegakan hukumnya seharusnya lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi daripada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Tetapi apabila memperhatikan asas-asas hukum yang baik seperti asas "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*" yang berarti ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang umum). Aturan yang tepat untuk diterapkan sebagai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan hukum yang khusus yang mengesampingkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menentukan:

1. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer

tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

Kajian penulisan tesis ini akan difokuskan pada permasalahan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Sehingga untuk itu penulis tertarik untuk menulis tesis yang berjudul **“Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer”**.

B. Perumusan Masalah

Dilandasi latar belakang masalah tersebut di atas serta agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan tesis nantinya, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer?
2. Bagaimana arah pembaharuan hukum kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer di masa mendatang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum positif terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis arah pembaharuan hukum kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer di masa mendatang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum yang terkait.
- b. Secara teoretis, sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan juga dapat dijadikan sebagai titik tolak mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut khususnya berkaitan dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.

D. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui maksud yang terkandung dari judul tesis ini, perlulah disimak pengertian beberapa konsep di bawah ini:

1. Kewenangan

Menurut Ateng Syafrudin dalam Salim HS dan Erlies Septiana

Nurbani, menyajikan pengertian kewenangan. Ia mengemukakan bahwa:

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka

pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini menentukan: bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Tindak pidana korupsi itu sendiri adalah tindakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap penyelenggara negara, seperti yang dimaksud dalam

¹⁴Salim HS dan Erlies SN, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke -1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 193.

¹⁵Selfi Suriyadinata, Ananda Putra Rezeki, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Vol. 5 No. 1 2023 hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diharapkan dapat dibebaskan dari segala bentuk perbuatan yang tidak terpuji, sehingga terbentuk aparat dan aparatur penyelenggara negara yang benar benar bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Penegakan hukum

Adalah “menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹⁶ Serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum menurut pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan:

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷

¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.5.

¹⁷Jimly Ashidiqie, “*Penegakan Hukum*”, diakses melalui <http://solusihukum.com>. tanggal akses 25 Maret 2025.

4. Tindak pidana korupsi

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan bahwa: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
 6. Saksi yang membuka identitas pelapor
5. Anggota militer

Pengertian militer berasal dari Bahasa Yunani "*Milies*" yang berarti orang yang bersenjata yang siap bertempur yaitu orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Tidak setiap orang yang bersenjata dan siap berkelahi atau bertempur dapat dikatakan militer tetapi dikatakan militer jika memiliki organisasi yang teratur, mengenakan pakaian seragam,

mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan.¹⁸

Militer adalah warga negara yang oleh undang-undang bertugas untuk menjaga kedaulatan negara dan diberikan kewenangan untuk memegang senjata, anggota militer terdiri dari tentara, prajurit siswa, prajurit mobilisan dan orang sipil yang diberikan pangkat tituler.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 Angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, menentukan:

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer menentukan: “Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menentukan: “Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, Sedangkan dalam Pasal 46

¹⁸Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 18.

¹⁹VE. Roman, “Militer dan Sistem Peradilan Militer”, *eJournal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Yogyakarta, 2018, hlm. 21.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan definisi Militer sebagai berikut:

Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut; Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas.

Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juga memberikan perluasan mengenai pengertian militer yaitu barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas. Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyebutkan militer adalah mereka yang bekerja untuk Angkatan Perang, pengertian tentang Angkatan Perang diatur dalam Pasal 45 dan pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah:

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional);
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional);
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional);
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Angkatan Perang merupakan wadah bagi orang-orang yang ditugaskan untuk berperang, maka Pasal 46 dan Pasal 47 merupakan penegasan siapa orangnya yang termasuk didalamnya wadah tersebut. Pasal

49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang juga memberikan perluasan bagi pengertian militer termasuk di dalamnya yaitu:

- 1) Bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer;
- 2) Komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu;
- 3) Pensiunan perwira anggota dari suatu Peradilan Militer (luar biasa), setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.
- 4) Mereka yang memakai pangkat titular militer yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-Undang, atau yang dalam keadaan bahaya kepada mereka yang dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Keadaan Bahaya (UU No. 23 Prp Tahun 1959) diberikan pangkat titular, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer;
- 5) Mereka anggota dari suatu organisasi, yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut atau Udara atau dipandang sedemikian itu:
 - a. Dengan atau berdasarkan Undang-Undang;
 - b. Selama keadaan bahaya oleh penguasa perang ditetapkan dengan atau berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Keadaan Bahaya.

Berdasarkan konsep-konsep pengertian di atas, dapat penulis kemukakan bahwa kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang diberikan kepada lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam menangani terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Landasan Teoretis

Sesuai dengan permasalahan hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori kewenangan dan teori penegakan hukum.

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan tidak terlepas dari teori kekuasaan, karena kewenangan ada akibat adanya kekuasaan. Miriam Budiardjo dalam Sinaga mengemukakan bahwa: “kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkahlaku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan itu”.²⁰

Lebih lanjut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam Sinaga mengemukakan bahwa “kekuasaan adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan dalam suatu hubungan, di mana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai dengan tujuan dari pihak pertama”²¹. Hematnya yang dimaksud dengan kekuasaan adalah “kemungkinan untuk membatasi alternatif-alternatif bertindak dari seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan tujuan dari

²⁰Patuan Sinaga, *Hubungan Antara Kekuasaan Dengan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 76

²¹*Ibid.*

pihak pertama dengan menggunakan kekuasaan atau kekuatan, maupun dengan persuasi”.²²

Kata kewenangan berasal dari kata wenang, wewenang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Poerwadarminta disebutkan bahwa “wenang (wewenang) atau kewenangan adalah hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu) disebutkan “wenang”²³. Dalam *Modern Dictionary of Sociology* yang dikutip oleh Salusu disebutkan wewenang (*authority*) diartikan sebagai kuasa yang disahkan atau dilembagakan dalam suatu masyarakat atau sistim sosial lain. Bentuk sosial ini dikaitkan dengan status sosial dan diterima oleh anggota-anggota dari sistim sosial itu sebagai yang benar dan sah.²⁴

Selanjutnya Simon dalam J. Salusu mengemukakan bahwa wewenang dapat diartikan kekuatan untuk membuat suatu keputusan yang membimbing tindakan-tindakan individu lainnya. Wewenang merupakan hubungan antara dua inividu, satunya “atasan, dan yang lainnya “bawahan”²⁵ Sedangkan Bagir Manan menyebutkan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).²⁶ Sementara itu Prajudi

²²*Ibid.*

²³Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1150.

²⁴J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, Grasindo, Jakarta, 1996, hlm. 214.

²⁵*Ibid.*

²⁶Bagir Manan dan Kuntana, Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: Almi, 1997.

Atmosudirdjo membedakan kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*). Lebih lanjut disebutkan bahwa kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif. Kewenangan (yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdil/instrument* tertentu saja.

Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts bevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani /menerbitkan surat-surat ijin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangannya tetap berada di tangan menteri tersebut (pendelegasian wewenang).²⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, suatu kewenangan dapat diperoleh dari tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, sedang delegasi dan mandat merupakan suatu kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Perbedaan antara kewenangan berdasarkan delegasi dan mandat adalah terletak pada prosedur pelimpahannya,

²⁷Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78.

tanggung jawab dan tanggung gugatnya serta kemungkinan dipergunakannya kembali kewenangan tersebut. Dilihat dari prosedur pelimpahannya pada delegasi, pelimpahan wewenang terjadi dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedang pada mandat pelimpahan wewenang umumnya terjadi dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali yang secara tegas dilarang. Ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggung gugatnya pada delegasi, tanggung jawab dan tanggung gugatnya beralih kepada yang diberi delegasi (*delegataris*), sedang pada mandat tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*). ditinjau dari segi kemungkinan pemberi wewenang berkehendak menggunakan kembali wewenang tersebut, pada delegasi pemberi wewenang (*delegans*) tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, sedang pada pemberi mandat wewenang mandat (*mandans*) setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan.²⁸

Dalam peraturan perundang-undangan, wewenang untuk menetapkan kebijakan merupakan pengaturan (*regeling*), sedangkan wewenang melaksanakan kebijakan tersebut merupakan wewenang pengurusan (*bestuur*), selanjutnya yang dimaksud:

- a. Wewenang pengaturan adalah wewenang untuk menciptakan norma hukum tertulis yang berlaku umum.
- b. Wewenang pengurusan adalah wewenang untuk melaksanakan dan menerapkan norma hukum umum dan abstrak kepada situasi konkret.

²⁸Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, UNAIR, Surabaya, 1994, hlm. 8.

- c. Penyerahan urusan Pemerintahan adalah penyerahan wewenang pengaturan dan wewenang pengurusan dalam gatra (bidang-bidang) kehidupan tertentu menurut peraturan perundang-undangan.²⁹

Kewenangan membuat suatu kebijakan terletak pada seorang pimpinan tertinggi, sebagaimana telah dikatakan oleh Prajudi Atmosoedirdjo³⁰. Lebih lanjut menurut Ahmad Sobirin, “Setelah seorang manajer memperoleh informasi, ia kemudian menggunakannya untuk mengambil keputusan organisasi, misalnya tentang dan kapan bagaimana organisasi harus menetapkan tujuan, merubahnya dan melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Di antara ketiga kategori peran manajer dalam organisasi, peran pengambilan keputusan mungkin bisa dikatakan sebagai peran yang paling penting, sebab dari keputusan manajerialah organisasi bisa berhasil atau sebaliknya. Dalam hal ini manajer bisa disebut sebagai inti dari system pengambilan keputusan sebagai negoisator”.³¹

Azhar Kasim menyatakan “Pengambilan keputusan merupakan fungsi utama seorang manajer atau administrator”.³² Gibson, dkk mengatakan bahwa “Pengambilan keputusan adalah tanggungjawab umum dari semua eksekutif, tanpa melihat bidang fungsional mereka atau jenjang manajemen mereka. Para manajer diharuskan, setiap hari, mengambil

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Prajudi Atmosudirdjo, *Loc. Cit.*

³¹ Achmad Sobirin, *Budaya Organisasi: Pengertian, makna dan aplikasinya dalam kehidupan organisasi*, UPP-STIM YKPN, Yogyakarta, 2007, hlm. 25-26.

³² Azhar Kasim, *Teori Pembuatan Keputusan*, lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 1.

keputusan yang menciptakan hari depan organisasi mereka maupun hari depan mereka sendiri”.³³

Hambrick dalam J. Salusu merumuskan keputusan stratejik sebagai biasanya berada dalam wilayah kewenangan manajemen puncak, terutama karena sangat penting bagi organisasi, apakah itu mengenai dampaknya atau mengenai implikasi jangka panjangnya. Mereka itulah yang memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan organisasi sehingga sewajarnya jika kewenangan membuat keputusan stratejik diserahkan kepada mereka.³⁴

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hickson *et.al.* bahwa keputusan stratejik adalah yang dibuat oleh mereka yang mempunyai kedudukan di bagian atas dan menyangkut masalah-masalah besar.³⁵

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kewenangan untuk membuat keputusan terletak pada manajer atau top manajemen dalam suatu organisasi.

Selanjutnya fokus kajian teori kewenangan menurut Salim HS dan Erlies S.N menyebutkan bahwa: “Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber-sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat”.³⁶

³³*Ibid.*

³⁴J. Salusu, *Op. Cit.*, hlm. 112.

³⁵*Ibid.*

³⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 193.

Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah bersumber dari undang-undang dasar dan undang-undang. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan tersebut di peroleh melalui 3 (tiga) cara yaitu Atribusi (*Attributie*), Delegasi (*Delegatie*), dan Mandat (*Mandaat*).

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

3. Mandat

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.³⁷

Kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attribute van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pemberian atau penciptaan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan *Grondwet* (Undang-undang Dasar) atau oleh *wet* (undang-undang) kepada suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Kewenangan delegasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan

³⁷*Ibid.*, hlm. 102.

perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.³⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.³⁹

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁴⁰ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁴¹

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi baik yang represif

³⁸Periksa, Sukanto Satoto dan Bahder Johan Nasution, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", LPPM Universitas Jambi, *Jurnal Sains Sosio Humaniora* P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019, hlm. 1.

³⁹Periksa, Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 37.

⁴⁰Periksa, Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2006, hlm.

15.

⁴¹Periksa, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁴²

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴³ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu: 1), penegakan hukum pidana *in abstracto*, dan 2), penegakan hukum pidana *in concreto*.

Membicarakan penegakan hukum tidak terlepas dari konsep sanksi pidana dan putusan hakim. Haryadi mengemukakan, bahwa:

Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi Tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pembedaan juga merupakan hal yang tidak kalah

⁴²Periksa, Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, him. 2

⁴³Periksa, Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24.

pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.⁴⁴

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Usman dan Andi Najemi bahwa:

Dalam kenyataannya tidak jarang ditemui putusan yang lebih mementingkan kepastian hukum, sehingga mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan atau juga sebaliknya lebih mementingkan keadilan dan kemanfaatan tetapi mengenyampingkan kepastian hukum. Dalam perkara pidana, seharusnya berlaku asas keadilan yang utama, sehingga dalam hal terjadi benturan nilai maka nilai keadilan yang harus dimenangkan.⁴⁵

Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang dilakukannya hukuman yang kejam, melarang penghukuman untuk kedua kalinya terhadap kesalahan yang sama. Menolak diterapkannya peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap Tindakan yang dilakukan sebelum ada peraturan yang mengaturnya, menolak pembentukan undang-undang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang.⁴⁶

Senada dengan hal di atas, esensi putusan yang lebih mementingkan aspek kepastian hukum, Hafrida mengemukakan: “Putusan hakim merupakan muara dari penerapan aturan norma hukum pidana. Putusan

⁴⁴Haryadi, “Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pembedaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, hlm. 139. https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DINKF-G0AAAAJ%26citation_for_view%3DINKF-G0AAAAJ%3ASe3iqnhoufwC%26tzm%3D-420, hlm. 5.

⁴⁵Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83, hlm. 70. https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DINKF-G0AAAAJ%26citation_for_view%3DINKF-G0AAAAJ%3ASe3iqnhoufwC%26tzm%3D-420, hlm. 5.

⁴⁶Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014* <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938>, tanggal akses 17 Februari 2025.

hakim merupakan cerminan dalam penegakan hukum atas suatu perbuatan pidana”.⁴⁷

Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti mengemukakan, bahwa: “Dengan terpenuhi semua unsur tindak pidana, maka seseorang dapat dijatuhi suatu sanksi pidana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.⁴⁸

Helmi Yunetri dan Abadi Darmo, mengemukakan;

Penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama lebih dikonsentrasikan kepada faktor yang melatarbelakangi terjadinya putusan disparitas. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda terhadap objek perkara yang sama adalah hakim lebih menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis (fakta hukum yang terdapat dipersidangan), dari pada pertimbangan bersifat nonyuridis. Tidak adanya kesamaan pendapat hakim dalam menilai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sanksi pidana yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan tersebut serta tidak adanya formulasi yang jelas tentang penilaian tersebut. Hakim diperkenankan untuk menggali dan menafsirkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.⁴⁹

F. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau penelitian terkait dengan judul penelitian yang dibahas dalam tesis ini, pada

⁴⁷Hafriada, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Jambi”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Volume 16, Nomor 1, hlm. 55-66 ISSN:0852-8349 Januari – Juni 2014, hlm. 59.

⁴⁸Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, “Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa”, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, p-ISSN:2580-1120 e-ISSN:2580-2178 LPPM Universitas Jambi. diakses melalui <https://scholar.google.co.id/citations?user=cvtqBCgAAAAJ&hl=id>, tanggal akses 17 Februari 2025.

⁴⁹Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, “Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi”, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009).

dasarnya telah terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer, yakni:

1. Jurnal, "Optimalisasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum" oleh Gaung Wira Utama, Adi Mansar, Eka N.A.M Sihombing, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Volume 5 Nomor 2, Feb 2024 – Mei 2024: hlm 595-603.

Masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah tentang pengaturan kewenangan komisi pemberantasan korupsi (KPK) terhadap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*), namun jika melihat rumusan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang memberikan kewenangan KPK untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; menyangkut kerugian negara maka dapat dikatakan bahwa secara mutlak penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan kewenangan KPK semata.

2. Jurnal, “Kewenangan KPK dalam penanganan kasus tipikor di lingkungan TNI menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK” oleh Ones Marsahala Panungkun Pakpahan dkk, *Jurnal Lex Privatum* Vol. IX/No. 8/Jul/2021.

Masalah yang dibahas adalah tentang peran KPK dalam menangani anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi dan bagaimanakah pertanggung jawaban pidana anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi adalah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengkoordinasikan serta mengendalikan penanganan perkara koneksitas, sehingga KPK dapat berkoordinasi dengan penyidik dari militer saja. Oleh karena itu KPK tidak secara mutlak memiliki kewenangan menangani anggota TNI yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan pertanggungjawaban bagi anggota militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, menurut penulis pemberlakuan sanksi administratif militer, setelah itu pemberlakuan sanksi pidana baik hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Tetapi mengedepankan pemberlakuan hukum pidana militer dalam pertanggungjawaban pidananya.

3. Jurnal, “Wewenang KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif dikaji dari teori hukum pembangunan” oleh Yoses Ondrasi Telaumbanua, Hasruddin Pagajang, Simona Bustani,

Jurnal Advances in Social Humanities Research Vol 1 No. 11 Januari 2024.

Masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah tentang kewenangan KPK untuk melakukan tugas dan fungsi dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif yang dikaji dari teori hukum pembangunan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif. Selanjutnya, oleh karena dalam Pasal 5 Undang-Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan secara tegas tentang peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yaitu Peradilan umum dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga mengesampingkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau berlaku asas *Lex Specialis derogate Lex Generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum).

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peran KPK dalam menangani anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan tindak pidana

korupsi pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada pengaturan hukum positif terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer dan kemudian membahas arah pembaharuan hukum kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer di masa mendatang.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai: “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁵⁰

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan laporan penelitian.

Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29.

dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.⁵¹

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.⁵²

Tipe penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum secara yuridis normatif yaitu penelitian yang melekatkan hukum sebagai sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin berkenaan dengan hal yang menjadi objek penelitian merupakan konflik norma yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Yang menjadi faktor yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

⁵¹*Ibid.*, hlm. 93.

⁵²*Ibid.*.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tipe penelitian hukum secara yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan yang ajeng dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah ilmu hukum itu sendiri.

2. Pendekatan yang digunakan

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵³

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian karya ilmiah menurut Bahder Johan Nasution adalah: “Terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*)”.⁵⁴

Tipe penelitian yuridis normatif menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan, bahwa:

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 133.

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a) Pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatar belakangnya.
- c) Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.
- d) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.
- e) Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
- f) Pendekatan kefilosofan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum.⁵⁵

Sedangkan penelitian yuridis normatif dalam penulisan tesis ini digunakan tipe penelitian yaitu,

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan: “pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.⁵⁶ Pendekatan undang-

⁵⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92-93.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 92.

undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.⁵⁷

Pendekatan konsep menurut pertimbangan penulis perlu dilakukan karena konsep-konsep yang dipergunakan setiap saat bisa berkembang dari waktu ke waktu. Konsep mengenai kewenangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penegakan hukum tindak pidana korupsi dan anggota militer.

3. Pendekatan kasus (*case law approach*)

Pendekatan kasus di dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang mengemuka terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk melihat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana

⁵⁷*Ibid.*

korupsi yang dilakukan oleh anggota militer, kasus tersebut telah menempuh proses hukum, yaitu: kasus suap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Republik Indonesia Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA) dalam pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan. Kasus ini telah menjadi polemik antara KPK dengan Puspom TNI, dengan duduk permasalahan bahwa Puspom menyatakan bahwa KPK tidak berwenang menetapkan tersangka Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, dengan alasan bahwa Marsekal Henri merupakan TNI Aktif.

3. Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun yang menjadi dasar bahan hukum dalam penulisan penelitian ini yakni, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahder Johan Nasution mengemukakan: “Bahan

hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas”.⁵⁸ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara.

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur, buku-buku hukum termasuk tesis, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan buku-buku lain yang berkaitan langsung dengan tema penulisan penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah: “memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah”.⁵⁹ Bahan hukum sekunder ini sebagai alat bantu dalam penulisan penelitian ini.

Jenis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 181.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 196.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan
 5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: buku-buku hukum dan jurnal dan makalah hukum.
 - c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi *Black,s Law Dictionary* dan Kamus Hukum.

4. Analisis bahan hukum

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat penelitian

yang diharapkan, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisannya.

- Bab II Tinjauan Umum, menguraikan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer.
- Bab III Pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan mengenai pengaturan hukum positif terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.
- Bab IV Pembahasan, merupakan pembahasan mengenai arah pembaharuan hukum kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer di masa mendatang. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.
- Bab V Penutup, berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.